

Analisis Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pada Belanja Modal Yang Dilakukan Pada Kota Surabaya

Ericho Rizal Ardana, Aldiansyah Dwi Putra Husada, Annas Subakti

Administrasi Publik, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, 60231

ARTICLE INFO

Article history:

Received March 07, 2025

Revised March 09, 2025

Accepted March 15, 2025

Available online March 20, 2025

Kata Kunci:

SILPA, APBD, Sisa belanja modal, Kinerja Keuangan Daerah.

Keywords:

SILPA, APBD, Remaining capital expenditure, Regional Financial Performance.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Penelitian mengenai pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada belanja modal pada kota Surabaya bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaruh terhadap komponen yang ada pada APBD berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan unsur-unsur pembentuknya. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu Kota Surabaya. Dalam proses penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa studi literatur membandingkan jurnal dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan kondisi nota keuangan pemerintah kota Surabaya. Berdasarkan dari hasil analisis yang telah dilakukan penulis, menunjukkan salah satu komponen APBD (SiLPA) dipengaruhi secara signifikan oleh unsur-unsur pembentuknya. Yaitu belanja modal yang paling utama, belanja non modal dan pelampauan pendapat berpengaruh signifikan pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

ABSTRACT

The study on the influence of Budget Calculation Surplus (SiLPA) on capital expenditure in the city of Surabaya aims to determine the influence on the components in the APBD in the form of Budget Calculation Surplus (SiLPA) and its constituent elements. The sample used in this study is the city of Surabaya. In this research process, a research method was used in the form of a literature study comparing journals from previous studies

that were relevant to the condition of the Surabaya city government's financial notes. Based on the results of the analysis that the author has conducted, it shows that one of the components of the APBD (SiLPA) is significantly influenced by its constituent elements. Namely the most important capital expenditure, non-capital expenditure and excess income have a significant effect on the Budget Calculation Surplus (SiLPA).

PENDAHULUAN

Perubahan mengenai tata pemerintahan yang ada di Indonesia dimana berawal dari sentralisasi dan dirubah menjadi desentralisasi, hal tersebut diketahui dengan adanya implementasi Undang-Undang No. 22 tentang Pemerintahan daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang telah dilakukan pada tahun 2001.

Undang-Undang tersebut telah digantikan oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Dengan adanya perubahan mengenai Undang-Undang tersebut menjadikan terjadinya perubahan mengenai otonomi daerah dengan terbentuknya desentralisasi fiskal dengan melakukan pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat dalam hal pengelolaan mengenai sumber penerimaan dan pengelolaan mengenai keuangan daerah yang dilakukan secara mandiri untuk melakukan penetapan atas prioritas pembangunan.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah memiliki peran yang penting pada era otonomi sekarang. Pengelolaan mengenai keuangan daerah yang timbul dari terbentuknya otonomi daerah ataupun desentralisasi fiskal telah dijelaskan pada Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 yang menjelaskan bahwa aspek yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan yaitu seluruh kegiatan pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan. Pada peraturan tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan mengenai keuangan daerah harus taat dan mematuhi peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, dan bertanggung jawab [1].

Dalam melakukan pengelolaan atas keuangan daerah ini disertai dengan adanya konsekuensi antara hubungan keuangan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah dengan merujuk pada fungsi money follow function yang berarti bahwa setiap bentuk dari penyerahan kewenangan harus disertai dengan penyerahan pendanaan juga untuk melaksanakan wewenang yang sesuai dengan fungsi yang ada pada pemerintahan yang dimana hal tersebut merupakan tanggung jawab dari tiap pemerintahan.

*Corresponding author

Emai : erichorizal.21062@mhs.unesa.ac.id

Pada penetapan alokasi APBD yang berbeda dari tahun ke tahun dianggap mengalami peningkatan, hal tersebut dianggap bahwa dengan adanya peningkatan alokasi APBD terjadi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun mengenai penganggaran dan pelaksanaan mengenai APBD tidak dilakukan dengan baik dan optimal sehingga kesejahteraan masyarakat pun sulit untuk dicapai karena kurangnya pengoptimalan mengenai alokasi APBD. Kondisi mengenai APBD di Kota Surabaya pada tahun 2014 hingga 2018 dianggap meningkat dengan optimal mengenai sisi belanja dan sisi pendapatan, namun hal tersebut tidak sesuai dengan realisasi mengenai pelaksanaan alokasi tersebut sehingga adanya kemunculan mengenai ketidaksesuaian mengakibatkan adanya akumulasi menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) [2].

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian APBD

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan pada Undang-Undang No.17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara menjelaskan bahwa APBD merupakan rencana keuangan tahunan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah yang telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Anggaran dari pendapatan dan belanja (APBD) yang telah ditetapkan dengan bentuk Peraturan Daerah (Perda) memiliki fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan, distribusi, alokasi, dan stabilisasi. Dalam APBD yang telah disusun oleh pemerintah daerah untuk menyelenggarakan fungsi dari pemerintah atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.

Belanja Negara

Belanja Negara adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk kepentingan publik. Belanja Negara merupakan salah satu komponen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencakup semua jenis pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Belanja Negara mencakup berbagai jenis pengeluaran, termasuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, subsidi, transfer, dan pembayaran bunga utang. Belanja pegawai meliputi gaji, tunjangan, dan bonus bagi pegawai pemerintah, sedangkan belanja barang dan jasa meliputi pembelian barang dan jasa seperti kendaraan, bahan bakar, dan peralatan. Belanja modal digunakan untuk membiayai investasi jangka panjang seperti pembangunan jalan, jembatan, gedung, dan infrastruktur lainnya.

Pengertian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) adalah sisa anggaran dari tahun sebelumnya yang tidak digunakan dan dianggarkan kembali untuk tahun berikutnya. Belanja modal, di sisi lain, adalah belanja yang digunakan untuk investasi dalam aset jangka panjang seperti gedung, jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. SiLPA terutama terjadi karena ketidaktepatan perencanaan anggaran, realisasi belanja yang lebih rendah dari yang dianggarkan, atau pendapatan yang lebih tinggi dari yang diharapkan.

SiLPA sering dianggap sebagai indikator kinerja yang baik dari pengelolaan keuangan pemerintah karena menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara efektif dan efisien.

Pengertian Belanja Modal

Dalam konteks APBN atau APBD, belanja modal merupakan salah satu jenis belanja yang mencakup pengeluaran untuk pembangunan atau pengadaan aset jangka panjang. Belanja modal biasanya dianggarkan dalam jangka waktu beberapa tahun dan melibatkan berbagai tahap pekerjaan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan proyek [3].

Pengelolaan belanja modal yang baik dan efektif sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini mencakup perencanaan yang baik, penganggaran yang tepat, pemilihan metode pembiayaan yang efisien, serta pelaksanaan proyek yang transparan, akuntabel, dan terukur.

Pengelolaan Sisa Anggaran

Pengelolaan sisa anggaran, yang juga dikenal sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran publik dihabiskan secara efisien dan efektif. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam pengelolaan sisa anggaran:

Evaluasi pengeluaran

Melakukan evaluasi terhadap pengeluaran yang telah dilakukan selama tahun anggaran berlangsung. Hal ini dapat membantu dalam mengidentifikasi jenis pengeluaran yang dapat dikurangi atau dieliminasi pada tahun anggaran berikutnya.

Perencanaan anggaran

Mengalokasikan sisa anggaran ke dalam rencana anggaran tahun anggaran berikutnya. Pemilihan prioritas dan proyek-proyek yang akan didanai dengan sisa anggaran harus sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dan kebutuhan masyarakat. Meningkatkan kinerja: Sisa anggaran dapat digunakan

untuk meningkatkan kinerja pemerintah pada berbagai aspek, seperti infrastruktur, pelayanan publik, dan lain sebagainya.

Penggunaan dana cadangan: Sebagian dari sisa anggaran dapat dialokasikan ke dalam dana cadangan, yang digunakan untuk kebutuhan mendesak seperti penanggulangan bencana atau situasi darurat lainnya. Transparansi: Pengelolaan sisa anggaran harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mempublikasikan laporan keuangan yang jelas dan terbuka mengenai penggunaan sisa anggaran. Pengelolaan sisa anggaran yang baik dapat membantu pemerintah untuk memperoleh kepercayaan dan dukungan dari masyarakat, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu dengan melakukan studi literatur terhadap artikel jurnal ilmiah berdasarkan penelusuran dari Google Scholar. Adapun fokus yang diambil dalam penelitian ini adalah komponen yang ada pada APBD berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan unsur-unsur pembentuknya yaitu sisa belanja modal, sisa belanja non modal, dan pelampauan pendapatan di kota Surabaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama periode penelitian 2014-2018 antara pendapatan dan pengeluaran pemerintah kota Surabaya menunjukkan defisit dan juga surplus anggaran. Sebagai berikut: 2014 mengalami surplus 345.062.651.985,38, 2015 Mengalami surplus 128.671.401.404,97, 2016 Mengalami defisit (325.907.273.538,95), 2017 Mengalami surplus 121.164.011.412,58 dan 2018 mengalami defisit (1.710.375.629,53).

Terjadi surplus anggaran

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah, Kementerian Keuangan, surplus APBD terjadi ketika jumlah pendapatan yang diterima lebih besar daripada jumlah pengeluaran yang dikeluarkan. Sehingga terjadi sisa anggaran yang nanti masuk ke SiLPA. Begitupun sebaliknya ketika mengalami defisit jumlah pendapatan yang diterima lebih kecil daripada jumlah pengeluaran yang dikeluarkan. Oleh karena itu, jika APBD mengalami defisit, Pemerintah Kota Surabaya akan mencari sumber pembiayaan untuk menutupinya, termasuk menggunakan sumber pembiayaan seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dari tahun sebelumnya, cadangan, pinjaman, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan, serta penerimaan kembali pemberian pinjaman atau piutang. Karena tidak ada pendanaan khusus yang dialokasikan dari APBN untuk menutup defisit tersebut, maka Pemerintah Kota Surabaya harus mengandalkan sumber pembiayaan internal untuk menutupi defisit APBD tersebut. Berdasarkan memperhatikan sumber Silpa yang dijelaskan tadi mencoba membaca literatur-literatur penelitian terdahulu mengenai pembentukan SiLPA. Yang mana literatur yang kami temukan yaitu penelitian Kamelia (2017) yang mengungkapkan bahwa pelampauan pendapatan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap SiLPA di Kabupaten Bogor dengan nilai koefisien sebesar 0,916.

Selain itu, penelitian Bali (2013) juga menunjukkan bahwa SiLPA muncul karena beberapa termasuk pelampauan pendapatan daerah yang tidak terhitung dalam perhitungan anggaran. Lalu setelah kami mendapatkan landasan tersebut, kami mencoba menganalisa nota keuangan pemkot surabaya melalui laporan realisasi anggaran dan membandingkan dengan landasan dari hasil penelitian tadi. Berikut salah satu sumber nota keuangan pemkot surabaya yang kami analisis, yaitu laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2017: Yang hasilnya pada tahun anggaran 2017 yang menganggarkan pendapatan pemkot surabaya sebesar 7.904.894.969.358,00 namun pada realisasinya pendapatan pemkot surabaya sebesar 8.033.573.163.669,67 atau dalam presentasi 101,63% terealisasi dalam anggaran. Sehingga pendapatan pemkot surabaya melebihi apa yang dianggarkan. Maka hasil ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara pelampauan pendapatan daerah dengan SiLPA. bahwa semakin besar pelampauan pendapatan daerah yang dicapai oleh pemerintah daerah kota Surabaya, maka semakin meningkat juga Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) di kota Surabaya.

Kemudian studi literatur sumber pembentukan silpa yang kami jadikan landasan yaitu, hasil penelitian iswahyudi (2019) yang menyatakan Realisasi Belanja Modal, Barang dan Jasa secara simultan berpengaruh terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Kabupaten/ Kota Di Sulawesi Tengah. Hasil penelitian tadi Kemudian kami bandingkan dengan apa yang Kota Di Sulawesi Tengah. Hasil penelitian tadi Kemudian kami bandingkan dengan apa yang terjadi di anggaran pemkot surabaya. Berdasarkan membaca nota keuangan pemerintah kota Surabaya juga, saat realisasi apbd mengalami surplus yang didalam ada realisasi belanja modal khususnya dan belanja non modal yang kurang optimal seperti halnya yang terjadi di tahun anggaran 2014, Sebagai berikut:

Laporan realisasi anggaran tahun 2014 Pemkot Surabaya, menunjukan belanja modal yang dianggarkan sebesar 2.010.585.827.631,00 namun pada kenyataannya hanya terealisasi sebesar 1.404.366.425.421,00 atau dalam presentasi 69,85% dari yang dianggarkan. Dengan realisasi belanja yang sangat kurang atau tidak optimal maka terjadi surplus yang sangat banyak sebesar 345.062.651.985,38 maka Silpa pun terjadi. Itu yang terjadi pada juga tahun 2015, dan 2017. Dan begitupun sebaliknya ketika realisasi APBD mengalami defisit yang didalamnya ada realisasi belanja modal dan non modal yang cukup optimal, maka Silpa pun tidak terjadi dan bahkan guna menutupi defisit tersebut diambil dari pembiayaan termasuk Silpa tahun lalu. Seperti halnya yang terjadi pada tahun anggaran 2018 sebagai berikut:

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2018 Pemkot Surabaya menunjukan, belanja modal yang dianggarkan sebesar 2.720.098.071.386,00 dan terealisasi sebesar 2.430.061.039.309,45 atau dalam presentasi 89,34% terealisasi dari yang dianggarkan. Dengan realisasi belanja modal yang cukup tinggi dan cukup optimal, maka terjadi defisit anggaran sebesar 1.710.375.629,53 sehingga silpa tidak terjadi bahkan akan berkurang karena digunakan untuk pembiayaan guna menutup defisit anggaran tersebut. Itu yang terjadi juga di tahun 2016. Sehingga hasil analisis sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang kami jadikan landasan perbandingan yang menyatakan sisa belanja modal dan non modal berpengaruh terhadap Silpa.

Secara akumulatif antara tahun 2014 sampai tahun 2018 pemerintah kota Surabaya cenderung menghasilkan silpa dari pada mengurangi. Namun meskipun demikian kota Surabaya tetap mendapatkan predikat wtp oleh BPK dan diberikan oleh kementerian keuangan. Hal ini bisa dilihat bukan hanya silpa yang menjadi indikator utama dalam penilaian wtp tapi masih banyak indikator lain. Hal itu berbeda dengan penelitian Yuli Rani (2019) menyatakan Terdapat hubungan negatif antara kemampuan mempertahankan WTP dengan adanya SiLPA. Daerah yang mampu mempertahankan WTP cenderung memiliki SiLPA yang lebih sedikit, sementara daerah yang tidak mampu mempertahankan WTP cenderung memiliki SiLPA yang lebih banyak. Oleh karena itu, SiLPA merupakan indikasi negatif dalam pengelolaan keuangan daerah karena bukan merupakan hasil dari efisiensi atau dana bersih. Kata "cenderung" bisa diartikan tidak pasti hal itu terjadi di kota Surabaya. Dengan itu maka perlu ada tindakan untuk mengantisipasi hal tersebut. Hal ini penting

SIMPULAN

Karena meningkatnya SiLPA dianggap tidak baik dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan sinkronisasi dan keterkaitan antara perencanaan dan realisasi anggaran dalam pengelolaan pendapatan daerah. Salah satu contoh adalah dengan melakukan perencanaan target pendapatan daerah yang realistis sehingga tidak terjadi under estimate atau over estimate. Jika terjadi selisih antara target dan realisasi pendapatan, maka hal tersebut harus dimanfaatkan secara baik dalam alokasi belanja daerah agar tidak terakumulasi menjadi SiLPA. Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Komponen dalam APBD yang menyebabkan adanya SiLPA meliputi pelampauan target pendapatan daerah, sisa belanja modal, dan sisa belanja non modal. Ketiga variabel ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap adanya SiLPA di kabupaten dan kota di Jawa Timur.
2. Variabel belanja modal memiliki pengaruh paling tinggi terhadap pembentukan SiLPA, diikuti oleh variabel pelampauan pendapatan daerah dan sisa belanja non modal.
3. Terdapat hubungan negatif antara kemampuan mempertahankan WTP dengan adanya SiLPA. Daerah yang mampu mempertahankan WTP cenderung memiliki SiLPA yang lebih sedikit, sementara daerah yang tidak mampu mempertahankan WTP cenderung memiliki SiLPA yang lebih banyak. Oleh karena itu, SiLPA merupakan indikasi negatif dalam pengelolaan keuangan daerah karena bukan merupakan hasil dari efisiensi atau dana bersih. Tapi itu tidak berlaku di Pemkot Surabaya.

REFERENSI

- P. L. R. Yuliyah and L. Ardini, "Analisis Kinerja Pelaksanaan APBD Kota Surabaya Tahun 2016-2020," *J. Ris. Mhs. Akunt.*, vol. 10, no. 2, pp. 118-128, 2022, doi: 10.21067/jrma.v10i2.6653.
- T. A. Perdana, R. A. Budiantoro, and Febrianur Ibnu Fitroh Sukono Putra, "Mengukur Kinerja APBD Kota Surabaya Analisis Value For Money," *J. Inov.*, vol. 16, no. 2, pp. 339-346, 2020, [Online].
- P. S. S. Prabawati and E. Wany, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015," *Equilib. J. Ekon.*, vol. XV, no. 1, p. 1, 2018, doi: 10.30742/equilibrium.v0i0.414.

- N. Sugiardi and N. Supadmi, "Pengaruh Pad, Dau, Dan Silpa Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi," *E-Jurnal Akunt.*, vol. 7, no. 2, pp. 477–495, 2014.
- Bali, Thomas Tuba. 2013. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya SiLPA Tahun 2010 Ditinjau dari Aspek Manajemen Keuangan Daerah. Thesis. Universitas Gadjah Mada.
- Kamelia, Mely. 2017. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Dan Strategi Untuk Meminimalisirnya Pada Apbd Kabupaten Bogor. Thesis. Institut Pertanian Bogor
- Iswahyudin, "Pengaruh Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa terhadap Sisa Lebih Anggaran (SiLPA) Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah," *J. Katalogis*, vol. 4, no. 6, pp. 152–168, 2019.
-